

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 35
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024



PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JATIIYOSO
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penyusunan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATİYOSO TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I).....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan JATİYOSO Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan JATİYOSO.....	11
2.2 Analisis Kinerja Kecamatan JATİYOSO.....	49
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan JATİYOSO.....	50
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATİYOSO TAHUN 2024	52
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	52
3.2 Program dan Kegiatan.....	54
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD.....	64
3.3 Dana Indikatif.....	67
BAB IV PENUTUP.....	69
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.....	69
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024	12
Tabel 2.2	Kesesuaian antara RKPD Tahun 2024 dan Renja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024	23
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2024	30
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2024	35
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (capaian indikator) s/d Bulan Juni 2024	44
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024	53
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2024	55
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2024	19
Gambar 2.2	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara RKPD dengan Renja Tahun 2024	21
Gambar 2.3	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara APBD dengan Renja Tahun 2024	33
Gambar 3.1	Skema (flowchart), Pencapaian Tujuan dan Sasaran I Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024	65
Gambar 2.3	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara APBD dengan Renja Tahun 2024	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 dapat disusun. Renja Perubahan OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Bagi OPD Kecamatan JATİYOSO Renja Perubahan ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 4 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan. Renja Perubahan OPD Kecamatan JATİYOSO ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan OPD di dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja OPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan JATİYOSO, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan JATİYOSO

Karanganyar, September 2024
CAMAT JATİYOSO

HARYANTO,S.E.,M.A.P
Pembina
NIP. 196705141989031011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan JATIIYOSO Tahun 2024 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2024, diantaranya :

- a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya tambahan anggaran perubahan di tahun 2024.
- b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan II Tahun 2024 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan JATIIYOSO Tahun 2024 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan JATIIYOSO Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran “Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan JATIIYOSO tahun 2024 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17);
 28. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).
 29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 34);
 30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);

31. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan JATIYOSO Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun perubahan rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan semester sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Kecamatan JATIYOSO Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan JATIYOSO dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan kewilayahan Tahun 2024;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan JATIYOSO Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini antara lain:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan kewilayahan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;

3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA, RPD);
4. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan JATİYOSO, yang diuraikan dalam subbab-subbab.

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan JATİYOSO, keterkaitan antara Perubahan Renja OPD dengan dokumen Perubahan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan JATİYOSO, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
JATIYOSO TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)**

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Kecamatan JATIYOSO) Tahun 2024 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan JATIYOSO Tahun 2024 Triwulan II (Semester I). Subbab ini memuat penjelasan /uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan JATIYOSO tahun 2024 sampai Semester I dan evaluasinya.
- 2.2 Analisis Kinerja Kecamatan JATIYOSO berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan JATIYOSO berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan JATIYOSO, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan JATIYOSO berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan JATIYOSO untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan JATIYOSO.

**BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN JATIYOSO TAHUN 2024**

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: • Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan • Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JATYOSO
TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan JATYOSO Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan JATYOSO Tahun 2024
Tribulan II (Semester I)

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan JATYOSO Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan JATYOSO Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan JATYOSO untuk Tahun 2024, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan JATIIYOSO Tahun 2024

	No				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2024		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
	1				2	3	4	5	6	7	8	9
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.549.706.720		2.579.971.559		-30.264.839
7	01				KECAMATAN			2.549.706.720		2.579.971.559		-30.264.839
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.200.000.000	100 %	2.371.740.144	=	-171.740.144
7	01	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>10 Dokumen</i>	<i>15.018.636</i>	<i>10 Dokumen</i>	<i>9.030.200</i>	<i>=</i>	<i>5.988.436</i>
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.388.436	4 Dokumen	6.005.200	=	4.383.236
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.290.000	2 Dokumen	840.000	=	490.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.958.400	2 Dokumen	1.430.000	=	528.400

7	01	01	2.01	0004	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.381.800	2 Laporan	755.000	=	626.800
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 O/B	1.666.928.800	12 O/B	1.670.813.914	=	-3.885.114
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 O/B	1.666.928.800	12 O/B	1.670.813.914	=	-3.885.114
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Paket	151.961.884	12 Paket	225.704.530	=	-73.742.646
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.000.000	12 Paket	20.443.500	=	-7.443.500
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	12 Paket	54.242.580	=	-42.242.580
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	12 Paket	32.591.000	=	-12.591.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.951.596	12 Paket	16.315.000	=	-11.363.404
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000	12 Dokumen	1.450.000	=	530.000
7	01	01	2.06	0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	750.000		750.000
7	01	01	2.06	0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	89.350.000	12 Laporan	96.596.000	=	-7.246.000

7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	9.180.288	12 Dokumen	3.316.450	=	5.863.838
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	4 Unit	94.000.000	19 Unit	69.262.500	<	24.737.500
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	1 Unit	35.000.000	>	5.000.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	24.000.000	16 Unit	20.250.000	=	3.750.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.000.000	2 Unit	14.012.500	=	25.987.500
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Unit		-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	338.260.000	12 Laporan	320.715.000	=	17.545.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	1.875.000	=	625.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.600.000	=	-600.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	305.760.000	12 Laporan	288.240.000	=	17.520.000

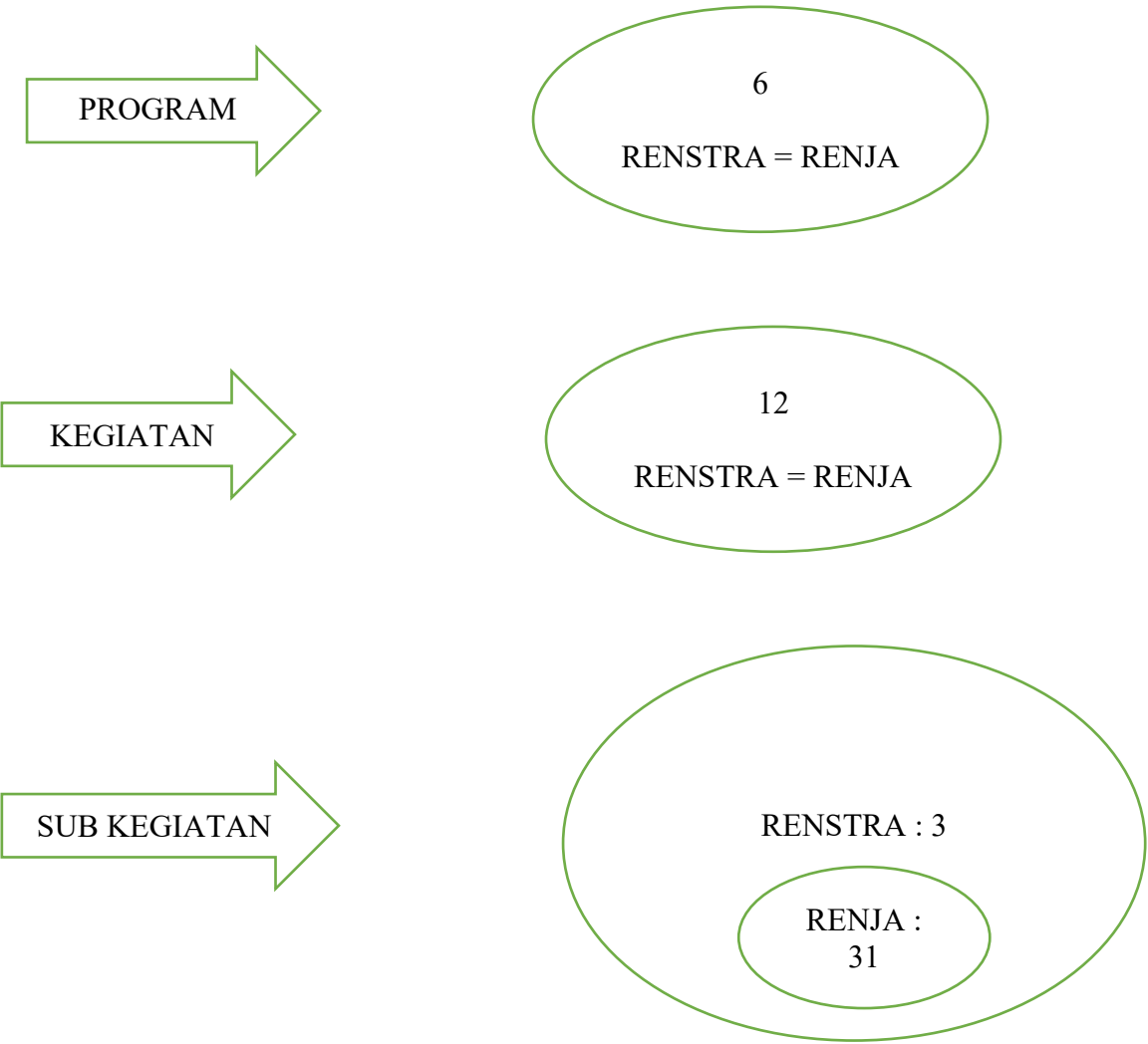
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	26 Unit	64.947.500	12 Bulan	76.214.000	=	-11.266.500
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	44.457.500	12 Bulan	62.514.000	<	-18.056.500
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	7.490.000	12 Bulan	4.500.000	>	2.990.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.000.000	12 Bulan	9.200.000	≠	3.800.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Nilai	7.101.900	81 Nilai	7.333.450	=	-231.550
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2 Laporan	7.101.900	2 Laporan	7.333.450	=	-231.550
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.451.900	2 Laporan	4.833.450	=	618.450

7	01	02	2.02	0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 Laporan	1.650.000	2 Laporan	2.500.000	=	-850.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	85.000.000	100%	61.443.100	=	23.556.900
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Laporan	70.000.000	3 Laporan	44.435.300	=	25.564.700
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	10.000.000	1 Lembaga	10.190.500	=	-190.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	34.244.800	=	25.755.200
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	17.007.800	=	-2.007.800
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	17.007.800	=	-2.007.800
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	16.500.000	100%	34.500.000	=	-18.000.000

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	34.500.000	=	-18.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	34.500.000	=	-18.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%	91.973.000	100%	86.089.865	=	5.883.135
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2 Kegiatan	91.973.000	2 Kegiatan	86.089.865	=	5.883.135
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	86.973.000	300 Orang	81.649.865	=	5.323.135
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	5.000.000	30 Orang	4.440.000	>	560.000

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	18.015.000	100%	18.865.000	=	-850.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	39 Dokumen	18.015.000	39 Dokumen	18.865.000	=	-850.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen	3.965.000	9 Dokumen	3.965.000	=	0
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	4.860.000	9 Dokumen	4.860.000	=	0
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	3.615.000	9 Dokumen	3.615.000	=	0
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	3.615.000	9 Dokumen	3.615.000	=	0
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	1.960.000	3 Dokumen	2.810.000	=	-850.000

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
 - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
 - Subkegiatan konsistensi sebesar : $(31/34) \times 100\% = 91,18\%$ (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 3 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum

dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra. 3 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2024 adalah :

- a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD;
- b. Subkegiatan Pengadaan Mebel : karena menyesuaikan alokasi anggaran;
- c. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : digunakan untuk pengadaan tempai ibadah (mushola) namun alokasi anggaran tidak mencukupi.

2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra, yaitu pada subkegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program mengalami perbedaan alokasi anggaran, hanya ada 1 kegiatan yang tidak mengalami perbedaan alokasi anggaran, dan beberapa sub kegiatan alokasi anggaran antara renstra dan renja sama (tidak mengalami perubahan/perbedaan). Dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - * Kegiatan yang tidak mengalami perubahan/perbedaan anggaran antara Rentra dan Renja yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - * Subkegiatan yang tidak mengalami perubahan/perbedaan anggaran antara Rentra dan Renja yaitu :
 - i) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

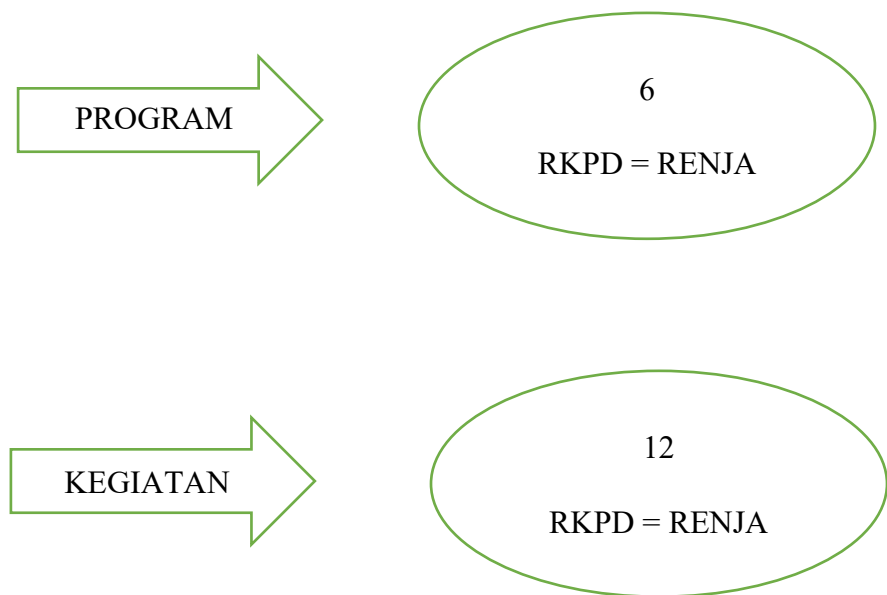
- ii) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- iii) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.579.971.559,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra : Rp. 2.549.706.720- hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja hampir mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran untuk Kecamatan JATİYOSO;

- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. -3.885.114,-; dan sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : Rp.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan Renja Baperlitbang Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan JATİYOSO untuk Tahun 2024, yaitu terhadap rancangan RKPD dan Renja Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan JATİYOSO dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2024. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :





Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
 - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (12 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD)
 - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (31 Subkegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
 - Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2024
 - Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2024
3. Kesesuaian alokasi anggaran
 - Alokasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2024

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara RKPD Tahun 2024 dan Renja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 konsisten / sesuai.

Tabel 2.2.
Kesesuaian antara RKPD Tahun 2024 dan Renja Kecamatan JATIIYOSO Tahun 2024

	No				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RKPD		RENJA 2024		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
	1				2	3	4	5	6	7	8	9
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.579.971.559		2.579.971.559		
7	01				KECAMATAN			2.579.971.559		2.579.971.559		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	93%	2.371.740.144	93 %	2.371.740.144	=	0
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	9.030.200	12 Dokumen	9.030.200	=	0
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.005.200	4 Dokumen	6.005.200	=	0
7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	755.000	2 Laporan	755.000	=	0
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	840.000	2 Dokumen	840.000	=	0
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian	2 Dokumen	1.430.000	2 Dokumen	1.430.000	=	0

						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 O/B	1.670.813.914	12 O/B	1.670.813.914	=	0
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 O/B	1.670.813.914	12 O/B	1.670.813.914	=	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Paket	225.704.530	12 Paket	225.704.530	=	0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.443.500	12 Paket	20.443.500	=	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	54.242.580	12 Paket	54.242.580	=	0
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.591.000	12 Paket	32.591.000	=	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.315.000	12 Paket	16.315.000	=	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.450.000	12 Dokumen	1.450.000	=	0
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	750.000	12 Dokumen	750.000	=	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	96.596.000	12 Laporan	96.596.000	=	0

7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3.316.450	12 Dokumen	3.316.450	=	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	1 Unit	69.262.500	1 Unit	69.262.500	=	0
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	35.000.000	2 Unit	35.000.000	=	0
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	20.250.000	16 Unit	20.250.000	=	0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.012.500	1 Unit	14.012.500	=	0
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	=	0
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	=	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	320.715.000	12 Laporan	320.715.000	=	0
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.875.000	12 Laporan	1.875.000	=	0

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	30.600.000	=	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	288.240.000	12 Laporan	288.240.000	=	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	6 Unit	76.214.000	13 Unit	76.214.000	<	0
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	62.514.000	5 Unit	62.514.000	=	0
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					=	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.500.000	4 Unit	4.500.000	=	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.200.000	1 Unit	9.200.000	=	0
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.420.900	1 Unit	5.420.900	=	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	7.333.450	80 Nilai	7.333.450	=	0

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2 Laporan	7.333.450	2 Laporan	7.333.450	=	0
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4.833.450	2 Laporan	4.833.450	=	0
7	01	02	2.02	000	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumla Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di wilayah Kecamatan	12	2.500.000	12	2.500.000	=	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	61.443.100	100%	61.443.100	=	0
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22 Laporan	44.435.300	22 Laporan	44.435.300	=	0
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	10.190.500	1 Lembaga	10.190.500	=	0
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	34.244.800	2 Laporan	34.244.800	=	0

7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di selenggarakan	1 Lembaga	17.007.800	1 Lembaga	17.007.800	=	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	34.500.000	100%	34.500.000	=	0
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	34.500.000	12 Laporan	34.500.000	=	0
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	34.500.000	12 Laporan	34.500.000	=	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	94%	86.089.865	94%	86.089.865	=	0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	115 Orang	86.089.865	115 Orang	86.089.865	=	0
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	81.649.865	300 Orang	81.649.865	=	0
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan	100 Orang	4.440.000	100 Orang	4.440.000	=	0

					Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	100%	18.865.000	100%	18.865.000	=	0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	Dokumen	18.865.000	Dokumen	18.865.000	=	0
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen	3.965.000	9 Dokumen	3.965.000	=	0
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	4.860.000	9 Dokumen	4.860.000	=	0
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	3.615.000	9 Dokumen	3.615.000	=	0
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	3.615.000	9 Dokumen	3.615.000	=	0
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan	3 Dokumen	2.810.000	3 Dokumen	2.810.000	=	0

						Pemberhentian Perangkat Desa						
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan JATİYOSO untuk Renja Tahun 2024, yaitu terhadap APBD Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan JATİYOSO dengan pagu APBD Tahun 2024. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

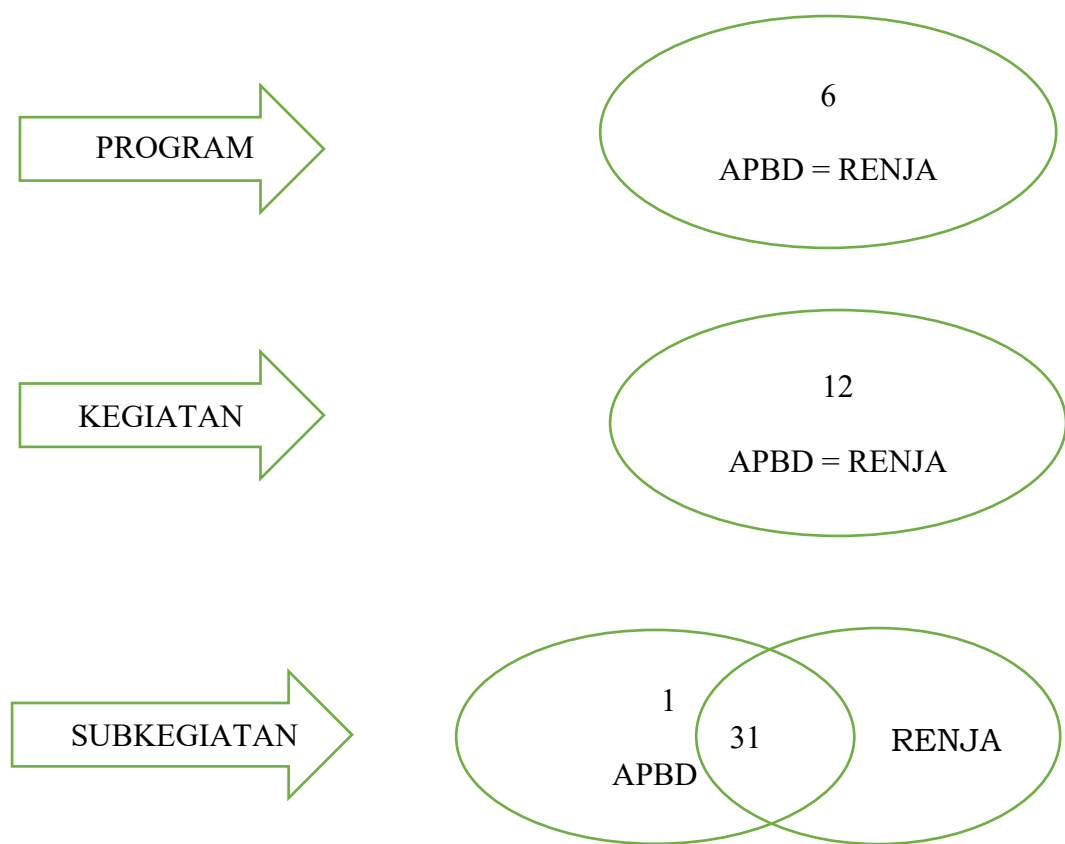
Tabel 2.3.
Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2024

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	RENJA	APBD	Ket
						Pagu Indikatif	Pagu	%
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.579.971.559	2.720.029.635	105,42
7	01				KECAMATAN	2.579.971.559	2.720.029.635	105,42
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	2.371.740.144	2.509.038.220	100,73
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.030.000	9.785.200	100
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.005.200	6.760.200	100
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	840.000	840.000	100
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.430.000	1.430.000	100
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	755.000	755.000	100
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.670.813.914	1.695.276.990	101,44
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.670.813.914	1.695.276.990	101,44
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.704.530	248.445.030	89,96
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.443.500	20.443.500	100
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.242.500	46.071.280	112,68
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.591.000	32.591.000	100
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.315.000	16.315.000	100
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.450.000	1.450.000	100
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.596.000	124.878.000	108,58
7	01	01	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000	750.000	100

7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.316.450	5.946.250	72,83
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.262.500	120.525.000	219,08
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	47.500.000	73,80
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.250.000	-	100
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.012.500	43.025.000	195,75
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	30.000.000	-100
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.715.000	335.475.000	99,74
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.875.000	1.875.000	100
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.600.000	30.000.000	73,85
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.240.000	303.600.00	90
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.214.000	99.531.000	178,44
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.514.000	62.514.000	100
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	100
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.200.000	32.517.000	219,55
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.333.450	7.333.450	100
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.333.450	7.333.450	100
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.833.450	4.833.450	100
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilaya Kecamatan	2.500.000	2.500.000	100
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.443.100	61.443.100	100
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.435.300	44.435.300	100

7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.190.500	10.190.500	100
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.244.800	34.244.800	100
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.007.800	17.007.800	100
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.500.000	36.810.000	90,6
7	01	04	2.01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	34.500.000	36.810.000	90,6
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.500.000	36.810.000	90,6
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.089.865	86.089.865	100
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	86.089.865	86.089.865	100
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	81.649.865	81.649.865	100
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.440.000	4.440.000	100
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.865.000	19.315.000	56,93
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	18.865.000	19.315.000	56,93
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.965.000	3.965.000	100
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.860.000	4.860.000	100
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.615.000	3.615.000	100
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.615.000	3.615.000	100
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.810.000	3.260.000	75

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2024 dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - Konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
 - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
 - Konsistensi Subkegiatan sebesar : $(31/32) \times 100\% = 96,86\%$; terdapat 1 Subkegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam Renja yaitu : Pengadaan

Mebel, dikarenakan adanya keperluan mendadak untuk pengadaan sehingga perubahan alokasi dalam penetapan APBD;

2. Kesesuaian indikator dan target

- Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan, kecuali pada subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

3. Kesesuaian alokasi anggaran

- Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.579.971.559,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.720.029.635,- ada kenaikan sebesar Rp. 100.000.000.- atau (1,22%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2024 Kecamatan JATİYOSO melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.720.029.635,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2024

No.					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.720.029.635	1.222.323.929	54,45	55
7	01				KECAMATAN			2.720.029.635	1.222.323.929	54,45	55
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	93 %	2.509.038.720	1.221.059.079	55,72	55
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	9.785.200	5.338.850	46,55	55
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.760.200	3.313.850	32,48	33
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumla Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	840.000	690.000	71,51	50

						Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	1.430.000	590.000	41,30	40
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	755.000	745.000	74,69	50
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 O/B	1.695.276.990	861.611.205	58,15	50
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 O/B	1.695.276.990	861.611.205	58,15	50
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Paket	225.704.530	53.056.104	59,77	60
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.443.500	4.072.925	42,93	45
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	46.071.280	5.222.829	42,11	50

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.591.000	6.552.500	52,26	55
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.315.000	8.484.250	71,51	72
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.450.000	625.000	50,00	50
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	750.000	345.000	50,00	50
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.878.000	24.976.000	45,66	47
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.946.250	2.777.600	79,15	80
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	8 Unit	120.525.000	88.070.122	49,75	50
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	47.500.000	45.320.122	80,0	80

					Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	43.025.000	42.750.000	80,0
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	30.000.000	-	-100
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	30.000.000	-	-100
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	335.475.000	140.598.248	41,09
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.875.000	875.000	50,0

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	14.023.248	36,04	37
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.600.000	125.700.000	41,67	40
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	13 Unit	99.531.000	27.314.000	88,92	90
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	62.514.000	24.590.000	66,04	70
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4.500.000	2.724.000	66,67	70
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	97,89	98
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		32.517.000	0	0	0

						atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	7.333.450	1.264.850		
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>7.333.450</i>	<i>1.264.850</i>		
7	01	02	2.02	0003	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>		<i>-100</i>
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4.833.450	1.264.850	66,67	70
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	61.443.100	21.220.550	69,74	70
7	01	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Laporan</i>	<i>44.435.300</i>	<i>21.220.550</i>	<i>69,74</i>	<i>70</i>

7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga	10.190.000	9.915.500	100	100
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	34.244.800	3.000.000	47,27	50
7	01	03	2.03		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Laporan	17.007.800	8.305.050	52,63	50
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	36.810.000	11.770.000	52,63	50
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Laporan	36.810.000	11.770.000	52,63	50
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.810.000	11.770.000	52,63	50

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	94%	86.089.865	3.665.000	22,20	37
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	<i>Orang</i>	<i>86.089.865</i>	<i>3.665.000</i>	<i>22,20</i>	<i>37</i>
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	81.649.865	-		-100
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	4.440.000	3.665.000	100	100
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	100%	19.315.000	8.415.000	28,27	25
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>19.315.000</i>	<i>8.415.000</i>	<i>28,27</i>	<i>25</i>

						<i>pengawasan pemerintahan desa</i>					
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen	3.965.000	1.500.000	47,27	50
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	4.860.000	2.250.000	46	50
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	3.615.000	2.115.000	100	100
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	3.615.000	2.550.000	100	100
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	3.260.000	-	-	-100

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2024 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.221.059.079,- atau 54,45% dengan realisasi fisik sebesar 55%. Untuk urusan perencanaan realisasi keuangan 46,55% dengan capaian fisik 47%, dapat dikatakan sementara uruasan perencanaan berjalan dengan efektif dan efisien. Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5. Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2024

No.					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
7					UNSUR KEWILAYAHAN			55
7	01				KECAMATAN			55
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	93 %	93
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1. RKA 2. DPA
7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1. Lap Trib I 2. Lap Trib II
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 O/B	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 O/B	Gaji dan TPP 12 org selama 6 bulan; dan THR, Gaji 13 th 2024
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33 Orang	Belum Terlaksana ya kegiatan Pegawai
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	33 Orang	

						Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Paket	Sudah terlaksana 6 paket
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Sudah terlaksana 6 paket
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Sudah terlaksana 6 paket
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Sudah terlaksana 6 paket
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Sudah terlaksana 6 paket
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Sudah terlaksana 12 Dok
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Sudah terlaksana 6 Laporan
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Sudah terlaksana 6 Dok
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	8 Unit	8 Unit
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	

7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit Kursi Pejabat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	3 Unit Filling Cabinet 1 Set CCTV
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Belum Terlaksana
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	Terlaksana 6 Laporan
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksana 6 Laporan
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksana 6 Laporan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksana 5 Laporan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	13 Unit	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Terpelihara 2 unit
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Terpelihara 2 unit printer
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terpelihara 1 unit
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan</i>	2 Laporan	Sudah Terlaksana Kegiatan
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Sudah Terlaksana Kegiatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	
7	01	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	22 Laporan	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	Terlaksana Musrenbang untuk 1 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Terlaksana 2 Laporan

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	
7	01	04	2.01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	12 Laporan	Terlaksana 6 Laporan
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Terlaksana 6 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	94%	
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	300 Orang	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	Terlaksana 1 kali rakor diikuti 300 orang
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	Telah terlaksana Rakor PKUB diikuti 100 orang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan</i>	<i>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan</i>	39 Dokumen	Terlaksana ya 34 Dokumen

					Pengawasan Pemerintahan Desa	pengawasan pemerintahan desa		
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen	Terlaksana 6 Laporan
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	Terlaksana 6 Laporan
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	Terlaksana 6 Laporan
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	Telah terlaksana Rakor fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kades dan Prades
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	Terlaksana 1 Dokumen

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan JATİYOSO

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan JATİYOSO berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan JATİYOSO, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan JATİYOSO terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indikator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;

- Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub kegiatan Pengadaan Mebel, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambahkan.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 2.579.971.559.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.720.029.635,- ada kenaikan sebesar 0,96%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 54,45%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka dapat disimpulkan realisasi telah melampaui target 50%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang mendadak harus dilaksanakan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan JATİYOSO

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan JATİYOSO untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan JATİYOSO. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan JATİYOSO sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan :
 - a. Keterkaitan tujuan sasaran OPD sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
 - b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan JATİYOSO dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan peran aktif / partisipasi dari setiap seksi dan bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan;

5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi atau revidi guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Kecamatan JATIYOSO juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan JATIYOSO. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap pelayanan yang menjadi salah satu tugas dan fungsi utama di kecamatan.
2. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum, antara berbagai pihak terkait. Perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang tertib, aman, tentram dalam kebersamaan.
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan JATIYOSO Tahun 2024, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan JATIYOSO Tahun 2024. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan JATIYOSO diuraikan pada Bab III.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATYOSO

TAHUN 2024

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan JATYOSO Tahun 2024, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan JATYOSO Tahun 2024. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan JATYOSO diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan :
 - a. Keterkaitan tujuan sasaran OPD sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
 - b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan JATYOSO dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan peran aktif / partisipasi dari setiap seksi dan bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan.;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi atau reviu guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan JATYOSO pada tahun 2024 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada misi ke-5 yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2024, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator serta targetnya.

Tabel 3.1.
Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024

No	Tujuan / Sasran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Keterangan Naik/Turun/=
				Sebelum	Sesudah	
I	Daerah					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai			
	Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai			
II	Kecamatan JATİYOSO					
	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72	72	=
	Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,5	73,5	=
	Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	%	8,52	8,52	=

	Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69	0,69	=
--	---	--------------------------	--------	------	------	---

3.2. **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2024 seperti tersebut diatas. Kecamatan JATYOSO pada tahun 2024 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dan sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 12 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2024.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan JATYOSO, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan JATYOSO di tahun 2024 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2024

No.					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik / Turun	
							Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Rp	%
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.720.029.635		2.770.029.635	50.000.000	4,11
7	01				KECAMATAN			2.720.029.635		2.770.029.635	50.000.000	4,11
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	93 %	2.509.038.220		2.563.298.220	54.260.000	3,37
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	9.785.200		9.785.200	0	0
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.760.200		6.760.200	0	0
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	840.000		840.000	0	0
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan	2 laporan	1.430.000		1.430.000	0	0

						Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	755.000		755.000			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 O/B	1.695.276.990		1.695.276.990	0	0	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 O/B	1.695.276.990		1.695.276.990	0	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Paket	248.445.030	12 Paket	248.445.030	0	0	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.443.500	12 Paket	20.443.500	0	0	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	46.071.280	12 Paket	46.071.280	0	0	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.591.000	12 Paket	32.591.000	0	0	

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.315.000	12 Paket	16.315.000	0	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.450.000	12 Dokumen	1.450.000	0	0
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	750.000	12 Laporan	750.000	0	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.878.000	12 Laporan	137.238.000	12.360.000	11,43
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.946.250	12 Dokumen	5.946.250	0	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	43 Unit	120.525.000	Unit	120.525.000	0	0
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Oprasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	47.500.000	3 Unit	47.500.000	0	0
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	Unit	0	0	0

7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	43.025.000	6 Unit	57.037.500	14.012.500	42,81
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	30.000.000	-	30.000.000	0	0
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	335.475.000	12 Laporan	335.475.000	0	0
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.875.000	12 Laporan	1.875.000	0	0
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	0	0

7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.600.000	12 Laporan	303.600.000	0	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 Unit	99.531.000	18 Unit	99.531.000	0	0
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	62.514.000	6 Unit	62.514.000	0	0
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	4.500.000	19 Unit	4.500.000	0	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.517.000	2 Unit	60.403.860	27.886.860	11.46
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	7.333.450		7.333.450	0	0

					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>7.333.450</i>		<i>7.333.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4.833.450		4.833.450	0	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	61.443.100		56.943.100	-4.500.000	28,42
7	01	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>44.435.300</i>		<i>44.435.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	10.190.500		10.190.500	0	0
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	2 Laporan	34.244.800		29.744.800	4.500.000	49,51

					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		17.007.800		17.007.800	0	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	36.810.000		39.000.0000	-2.190.000	49.51
7	01	04	2.01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>36.810.000</i>		<i>36.810.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.810.000		39.000.000	-2.190.000	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	94%	86.089.865		86.229.865	-140.000	49,51
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>86.089.865</i>		<i>86.089.865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

						urusan pemerintahan umum						
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	81.649.865		81.789.865	-140.000	35,79
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	4.440.000		4.440.000	0	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	100%	19.315.000		17.225.000	2.090.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	12 Dokumen	19.315.000		19.315.000	0	0
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan	9 Dokumen	3.965.000		3.965.000	0	0

						Desa dan Peraturan Kepala Desa							
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	4.840.000		4.840.000	0	0	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	3.615.000		3.615.000	0	0	
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	3.615.000		3.615.000	0	0	
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	3.260.000		1.170.000	2.090.000		

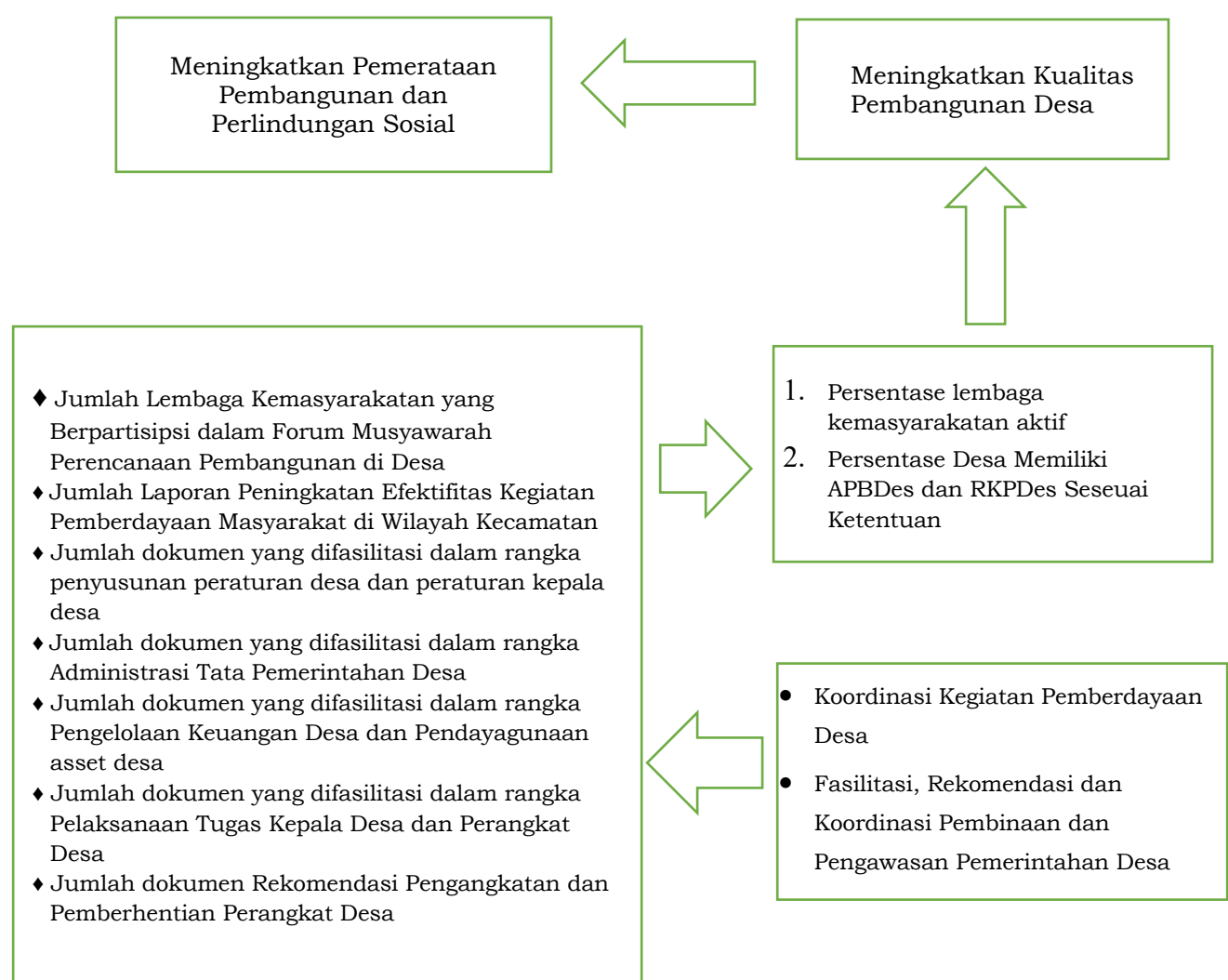
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan JATİYOSO, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan JATİYOSO, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut :



Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran I Kecamatan JATIIOSO
Tahun 2024



Gambar 3.2
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran II Kecamatan JATIIYOSO
Tahun 2024

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada
Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	12	12	12
3	Sub Kegiatan	31	31	31
4	Jumlah Dana	2.579.971.559	2.720.029.635	2.770.029.635

Sumber : Kecamatan JATYOSO, 2024

Perubahan Renja 2024 direncanakan :

- 1) Ada selisih dana sebesar Rp. ,- yang terutama karena:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bertambah sebesar Rp. 50.634.878,-
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertambah sebesar Rp. 12.360.000
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bertambah sebesar Rp.14.012.500
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah sebesar Rp. 27.886.960
- 2) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan JATİYOSO Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan JATİYOSO, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan JATİYOSO.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Perubahan Renja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;

- 3) Perubahan Renja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan JATİYOSO, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
- 4) Perubahan Renja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
- 5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan JATİYOSO Tahun 2024 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI



Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Sekretaris BAPERLITBANG	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPERLITBANG	

